BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia dewasa ini telah banyak mengalami kemajuan di berbagai bidang, seperti pendidikan, pertanian, perindustrian dan lain-lain. Semua itu tercapai berkat dukungan dari lembaga pemerintah maupun swasta, kedua lembaga tersebut mempunyai peranan yang saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, contohnya dalam lembaga pemerintah yaitu Kantor Pelayanan Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak merupakan salah satu lembaga yang mengelola dan mengawasi pepajakan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selain itu Kantor Pajak juga menangani masalah pelaporan perpajakan, pelayanan perpajakan dan menyimpan berkas-berkas yang berhubungan dengan perpajakan. Hal ini menyebabkan peranan Kantor Pajak sangat penting bagi pengelolaan perpajakan demi kelangsungan pembangunan.

Sebagai salah satu penerimaan negara dalam setiap tahunnya, anggaran penerimaan negara di sektor pajak mengalami peningkatan. Agar penerimaan dari sektor pajak tetap meningkat dalam setiap tahunnya maka dukungan dari masyarakat sangat diperlukan terutama mengenai kesadaran pengertiannya tentang pajak, selain itu juga kejujuran serta tanggung jawab dari masyarakat perlu ditingkatkan. Semua itu dapat ditempuh dengan motivasi, penyuluhan, dan

pendidikan sejak dini, disamping diberikan kepastian hukum yang memadai bagi Wajib Pajak dan para Aparatur Pajak.

Untuk itu Subjek Pajak, Objek Pajak dan kewajiban pemotongan serta pemungutan pajak perlu dipertegas dan diperluas agar dirasakan lebih adil oleh masyarakat, maka dari itu peningkatan kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak dalam membayar pajak, perlu diimbangi dengan peningkatan pelayanannya, sedangkan bagi Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak, perlu ditingkatkan lagi pelaksanaan penatausahaan yang baik dan pemberian sanksi perpajakan karena itu perlu ditekankan mengenai ketentuan sanksi pidana perpajakan dan penagihan pajak.

Hal tersebut di atas dilaksanakan karena bangsa Indonesia berkeinginan untuk meningkatkan kemampuannya sendiri dalam membangun dan mengurangi dalam ketergantungan pada luar negeri. Sehubungan dengan hal tersebut Kantor Pelayanan Pajak diharapkan mampu meningkatkan peran penatausahaannya. Yang salah satunya penatausahaan SPT Masa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Mengingat pentingnya peran Penatausahaan SPT Masa, yang erat hubungannya dengan Wajib Pajak maka penulis mencoba mengambil judul sebagai berikut: ***"Peranan Penatausahaan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Bandung Bojonagara".***

1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan menyusun laporan Tugas Akhir yaitu:

1. Untuk mengetehui Penatausahaan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Bandung Bojonagara.
2. Untuk mengetahui Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Bandung Bojonagara.
3. Untuk mengetahui Peranan Penatausahan SPT Masa PPh Pasal 21 terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Bandung Bojonagara.

1.3 Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini dipergunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi yang berlaku sekarang dan perlu dianalisis lebih lanjut bagian pembahasan serta dapat diambil suatu kesimpulan, langkah penelitian dan teknik pengumpulan data yang di lakukan adalah sebagai berikut:

1. Library Research (Penelitian Kepustakaan)

   Yaitu penelitaan yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku yang ada di perpustakaan dan *literature* yang dapat memberikan pemecahan sebagai bahan untuk melengkapi laporan Tugas Akhir.

2. Field Research (Penelitaan Lapangan)

   Yaitu penelitaan yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir.

3. Interview (Wawancara)

   Yaitu pengumpulan data dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan Pejabat-pejabat perpajakan yang mengelola masalah Pajak Penghasilan (PPh).Pasal 21 di KPP Bandung Bojonagara.

4. Observasi

   Yaitu suatu system pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan dan percataan mengenai perkembangan dan peranan penatausahaan SPT Masa PPh Pasal 21 di KPP Bojonagara.

1.4 Pembatasan Masalah

Agar penyusunan Laporan Tugas Akhir sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas serperti yang tertuang dalam judul laporan Tugas Akhir, maka dalam penulisan ini dibatasi masalahanya sebagai berikut:

1. Bagaiamana Penatausahaan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21
2. Sejauh mana Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Bojonagara
3. Bagaimana Peranan Penatausahaan SPT Masa Pajak penghasilan 21 terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas gambaran singkat isi dari laporan Tugas Akhir ini, maka penulis akan mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, maksud dan tujuan, metodologi penelitian, pembatasan masalah, sistematika penulisan yang kesemuanya merupakan kesatuan yang bulat dan mempunyai hubungan yang erat satusama lain.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi landasan teoritis dalam membatasi masalah ini yang termasuk dalam Bab ini adalah Pajak, Pengertian Pajak, Fungsi Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Pengertian Pajak Penghasilan, Subjek Pajak Penghasilan, Objek Pajak Penghasilan, Pengertian SSP, Fungsi SSP, Tempat Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Pengertian SPT Masa, Fungsi SPT masa, Prosedur yang menyangkut SPT Masa, Batas waktu penyampaian SPT masa, Pengertian Penatausahaan, Pengertian Wajib Pajak Penghasilan pasal 21, Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.

BAB III DATA HASIL PENELITIAN

Dalam Bab ini berisi tentang semua informasi yang ada di Kantor Pajak, yang berhubungan dengan masalah yang diambil diantaranya: sejarah singkat, struktur organisasi, uraian tugas, dan inti bahasan.

BAB IV ANALISA DAN USULAN HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan analisis hasil penelitian dan diuraikan mengenai hasil dari pemecahan masalah dalam laporan penelitian ini diantaranya: Analisa terhadap Peranan Penatausahaan SPT masa PPh pasal 21, analisa terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh pasal 21, analisa Penatausahaan SPT

Masa PPh pasal 21 terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, usulan terhadap Penatausahaan SPT masa PPh pasal 21,usulan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh pasal 21, dan usulan Penatausahaan SPT Masa PPh pasal 21 terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan yang merupakan jawaban dari isi pembatasan masalah, sebagai tindak lanjut dari kesimpulan ini, maka pada bab ini pula dikemukakan saran-saran yang merupakan kesimpulan dari usulan.